



**LAPORAN INDIVIDU
STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI
PADA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT**

**DISUSUN OLEH:
BRAM ABRAHAM, SE
NIP. 19791010 200701 1 024
NDH 25**

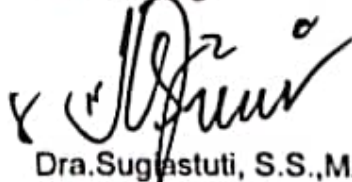
**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN III
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023**

**LEMBAR PENGESAHAN
STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI**

**PADA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT**

Bandung, Oktober 2023

Disetujui
Pembimbing I



Dra. Sugastuti, S.S., M.M.
Widyaiswara Ahli Utama
NIP. 196307091990032006

Peserta



Bram Abraham, S.E
NIP. 197910102007011024

Pembimbing II



Hj. Holijah, S.H., M.H
Widyaiswara Ahli Madya
NIP. 196909071996032004

**MENGESAHKAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



**Prof. Dr. H.M. Edwar Juliartha, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP 197507071997031003**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa menyelesaikan tugas Studi Lapangan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan baik dan lancar, dalam rangka memenuhi tugas Pembelajaran Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan Studi Lapangan (STULA) ini semoga bisa memberikan manfaat bagi peserta khususnya dan masyarakat pada umumnya, dalam mengembangkan pelayanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Banyak hasil positif yang dapat kita peroleh dan bisa diadopsi dalam peningkatan pelayanan pada dinas/ instansi kita masing-masing.

Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak/ Ibu Widhyaiswara yang telah memberikan bimbingan kepada kami dalam merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan studi lapangan dan tugas- tugas lainnya.
2. Ibu Hj.Holijah, S.H.,M.H sebagai pendamping selama melaksanakan Studi Lapangan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Bapak Penjabat Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan ijin kepada kami untuk mengadakan studi lapangan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Bapak Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta staf yang telah memberikan penjelasan dan gambaran tentang Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan studi lapangan ini sehingga selesai tepat pada waktunya.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada kami, mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan hasil studi lapangan ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Bandung, Oktober 2023

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
A. PROFIL ORGANISASI.....	1
B. PROFIL KINERJA PELAYANAN	7
C. ANALISA MASALAH KINERJA PELAYANAN.....	10
ORGANISASI	
D. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	12
1. Terobosan/Inovasi	12
2. Tahapan Kegiatan.....	15
3. Sumberdaya (Peta dan Pemanfaatan)	15
4. Manajemen Risiko.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	12
LAMPIRAN.....	12

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Capaian Aspek/Indikator Kinerja Biro Organisasi SETDA PEMPROV JABAR	9

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.....	1
Gambar 2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provisni Jawa Barat.....	2
Gambar 3 Komposisi Pegawai Setda Prov. Jawa Barat.....	5
Gambar 4 Rekap Pagu Anggaran dan Realisasi Setda Prov. Jawa Barat....	6
Gambar 5 Sarana dan Prasarana Setda Prov. Jawa Barat.....	6
Gambar 6 Core Business Setda Prov. Jawa Barat.....	7
Gambar 7 Sumber Daya Manusia Setda Prov. Jawa Barat.....	16

A. PROFIL ORGANISASI

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Daerah Jawa Barat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diawal berdirinya, Jawa Barat ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat yang meliputi wilayah Keresidenan Banten, Bogor, Jakarta, Priangan, dan Cirebon. Dalam perjalanannya, Provinsi Jawa Barat telah mengalami dua kali pemekaran melalui pembentukan DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 82 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1
Struktur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat



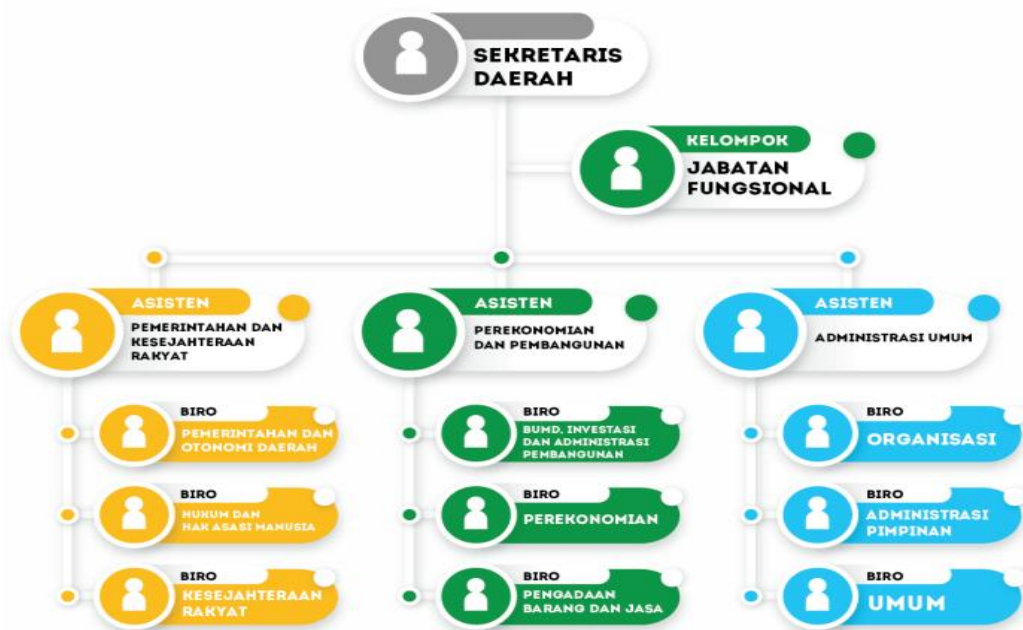
Sumber: Portal Jabar.go.id

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, tugas pokok Sekretariat Daerah adalah merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengkoordinasian administratif, membina, mengendalikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Selanjutnya Ayat (2) menguraikan fungsi Sekretariat Daerah adalah pada:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
- d. penyelenggaraan administrasi Sekretariat Daerah Provinsi;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Gambar 2
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber: RENSTRA SETDA PEMPROV JAWA BARAT

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang luas dan kompleks tersebut, Sekretariat Daerah di dukung oleh 3 (tiga) unit eselon Ib yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan umum, koordinasi, dan supervise perangkat daerah di sesuai dengan ruang lingkup asisten, serta 9 (Sembilan) Unit

Eselon II.a yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- b. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang hukum dan hak asasi manusia, meliputi perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- d. Biro Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang perekonomian, meliputi sumber daya alam, ketahanan pangan dan pertanian, serta sarana perekonomian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- e. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), investasi daerah dan administrasi pembangunan, meliputi BUMD Lembaga keuangan, Badan Layanan Umum Daerah, BUMD non lembaga keuangan, investasi daerah dan administrasi pembangunan;
- f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang pengadaan Barang dan Jasa, meliputi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan;

- g. Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang organisasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja serta tatalaksana yang menjadi kewenangan Provinsi;
- h. Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang administrasi pimpinan, meliputi rumah tangga, materi dan komunikasi pimpinan serta keprotokolan;
- i. Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dalam hal penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan asset dalam hal pemberian pelayanan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja, serta bidang tata usaha dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan pada lingkup Sekretariat Daerah.

2. Sumber Daya Manusia

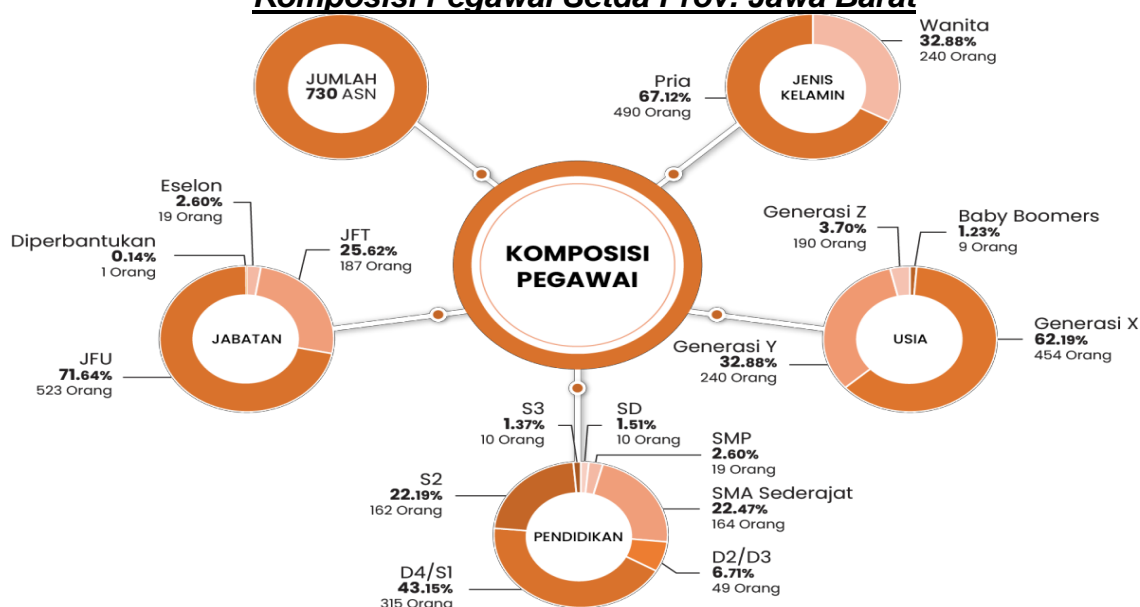
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar dan teknologi canggih namun tidak ada SDM yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, pentingnya peran SDM dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi.

Berdasarkan data kepegawaian s.d. bulan Desember 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Setda Jabar) memiliki pegawai sebanyak 1.264 orang dengan komposisi 702 PNS, 28 CPNS dan 534 Non ASN. Dari sisi kualitas, potensi PNS pada Setda Jabar cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dengan mayoritas pegawai merupakan Sarjana (36,58%) dan bergolongan ruang III (62,47%). Apabila dilihat dari komposisi usia, mayoritas berada pada rentang usia 41-50 tahun (39,86%). Ketiga komposisi tersebut menggambarkan mayoritas PNS pada Setda Jabar

memiliki pendidikan Sarjana atau memiliki pengalaman bekerja yang cukup lama. Keduanya, memiliki kontribusi positif terhadap ketercapaian kinerja unit organisasi.

Setda Jabar memiliki komposisi PNS dengan pendidikan D-III sebanyak 48 pegawai (6,58%). Jumlah tersebut lebih rendah dari pegawai berpendidikan SLTA sederajat sebanyak 157 pegawai (21,51%) dan pegawai Non ASN untuk mendukung kelancaran dan efektivitas kinerja PNS. Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum memiliki jumlah Non PNS yang cukup besar bila dibandingkan dengan Biro yang lain.

Gambar 3
Komposisi Pegawai Setda Prov. Jawa Barat

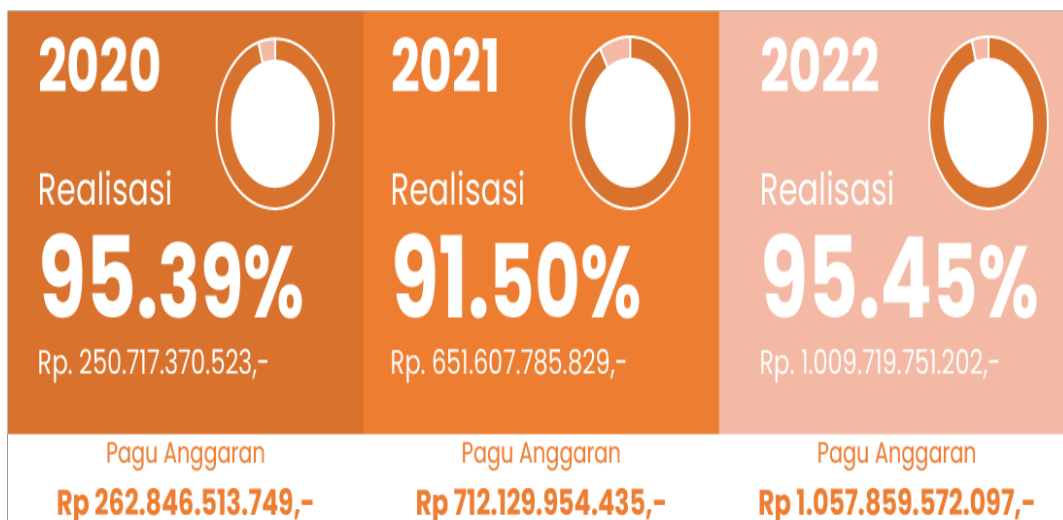


Sumber: RENSTRA SETDA PEMPROV JAWA BARAT

3. Sumber Daya Anggaran

Secara umum, selama tiga tahun terakhir, Setda Jabar mampu mengelola rata-rata 94,11% alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selama kurun waktu tahun 2020 s.d. tahun 2022, penetapan alokasi anggaran terus meningkat. Sedangkan dari sisi penggunaan anggaran ada sedikit penurunan persentase capaian di tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 capaian penggunaan anggaran sebesar 95,39%, tahun 2021 sebesar 91,50% dan tertinggi pada tahun 2022 dengan capaian 95,45%.

Gambar 4
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah



Sumber: LKPJ Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2022

4. Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana Setda Jabar meliputi tanah, bangunan, alat penyimpan data, logistik, alat keamanan dan alat transportasi. Tanah dan bangunan milik Setda Jabar tidak hanya berlokasi di Gedung Sate, namun juga di lokasi lain yang digunakan sebagai bangunan kantor, rumah negara, rumah dinas, gudang, tempat ibadah, maupun tanah kosong yang dapat dipergunakan oleh publik.

Gambar 5
Jenis Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah



Sumber: RENSTRA SETDA PEMPROV JAWA BARAT

B. PROFIL KINERJA PELAYANAN

Peran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi adalah pada perumusan kebijakan umum daerah provinsi. Peran ini, memberikan kontribusi optimal pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kontribusi peran ini tergambarkan dalam pencapaian kinerja setda yang sangat baik melalui pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan proyeksi tahun 2022 terealisasi pada predikat A.

Gambar 6
Core Business Sekretariat Daerah



Sumber: RENSTRA PEMPROV JAWA BARAT

Secara umum, sasaran strategis mengarah pada dua klasifikasi yaitu pemastian kualitas kebijakan Pemerintah Daerah serta pada pelaksanaan implementasi kebijakan.

Pada pemastian kualitas kebijakan, sasaran strategis ditetapkan dengan kalimat '**meningkatnya kualitas kebijakan**'. Sasaran ini difokuskan pada kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sehingga tolok ukur pencapaiannya diamanatkan kepada tiga biro yaitu Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, serta Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan.

Secara teknis, kinerja ketiga biro tersebut adalah untuk memastikan bahwa proses perumusan kebijakan dari mulai perencanaan hingga evaluasi

dipenuhi dan dipatuhi. Adapun pengukuran didasari pada perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

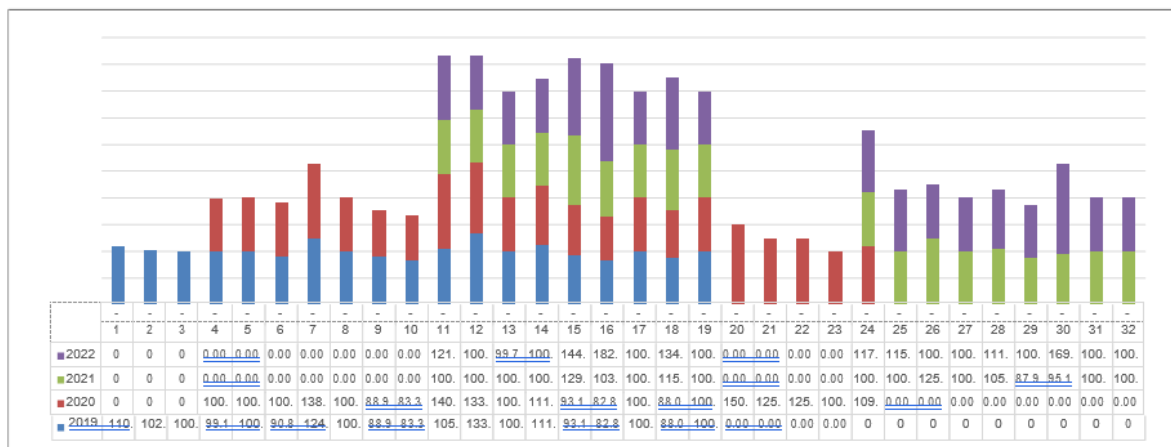
Kemudian, pada pemastian implementasi kebijakan dilakukan dengan menetapkan empat sasaran, antara lain:

1. meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang ditetapkan sebagai dukungan pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu **'terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih, dan akuntabel'** dan merupakan penerapan dari kebijakan terkait reformasi birokrasi. Adapun pencapaiannya diamanatkan kepada lima biro yaitu Biro Hukum dan HAM, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Biro Organisasi. Pengukuran yang menjadi tolok ukur pencapaiannya didasarkan pada perhitungan evaluasi penerapan reformasi birokrasi di delapan area perubahan sebagaimana dilakukan oleh KemenPAN & RB;
2. meningkatnya kualitas pembinaan, pemahaman pengamalan keagamaan yang ditetapkan sebagai dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu **'meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi'**. Kinerja ini merupakan implementasi dari kebijakan terkait kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama. Adapun pencapaiannya, diamanatkan hanya kepada Biro Kesejahteraan Rakyat yang mampu fungsi pembinaan bidang keagamaan;
3. diusulkannya calon daerah otonomi baru yang merupakan kinerja pendukung terhadap pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu **'terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan'**. Kinerja ini merupakan implementasi kebijakan pimpinan dalam pemekaran wilayah untuk menjamin terjadinya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Pencapaiannya diamanatkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan pengukuran didasarkan kepada kebijakan yang mengatur syarat pemekaran wilayah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000;

4. meningkatnya kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kinerja pendukung terhadap pencapaian sasaran pembangunan **‘terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif’**. Ini pun merupakan implementasi terhadap kebijakan pimpinan yang menekankan urgensi kolaborasi untuk pembangunan yang efektif dan efisien. Pencapaian sasaran ini diamanatkan hanya kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan pengukuran didasarkan kepada kebijakan yang mengatur tentang efektifitas kerjasama daerah;
5. meningkatnya kualitas layanan sekretariat daerah yang merupakan implementasi dari kebijakan tugas pokok dan fungsi untuk memastikan kinerja setda berjalan secara optimal. Kinerja ini merupakan kinerja pendukung bagi pencapaian sasaran setda yang lainnya. Adapun pencapaiannya diamanatkan kepada Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum dengan pengukuran melalui survey kepuasan.

Secara rata-rata kinerja Setda Pemprov Jabar dalam empat tahun terakhir menunjukkan kondisi yang memuaskan dengan capaian sebesar 103,5%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Setda Prov Jabar Tahun 2019-2022



Sumber: RENSTRA PEMPROV JAWA BARAT

C. ANALISA MASALAH KINERJA PELAYANAN ORGANISASI

Di dalam pelaksanaan fungsi '**penerapan tata kelola pemerintahan yang baik**' beberapa permasalahan yang diperoleh berkaitan dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap enam area perubahan yang berada dalam kewenangan fungsi setda. Enam area tersebut adalah manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, deregulasi kebijakan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

1. Area manajemen perubahan

Pada penerapan manajemen perubahan, budaya kinerja yang baik belum merata terjadi pada seluruh perangkat daerah. Hal ini diperlihatkan dari hasil evaluasi penerapan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Tahun 2021 yang pada area ini diperoleh nilai 4,07 poin dari nilai maksimal 5,00 poin. Salah satu pendorongnya adalah penerapan core value berAKHLAK baru mencapai 73,12 poin dari total nilai 100 poin dimana baru enam dari 37 perangkat daerah (16%) yang memperoleh kategori baik.

Disamping itu, perubahan birokrasi pun belum terinternalisasi secara menyeluruh. Hal ini terlihat baru sebanyak 81% dari total perangkat daerah termasuk ke dalam unit kerja dengan reformasi birokrasi dalam rentang kategori BB dan B. Hal ini mengandung arti bahwa reformasi birokrasi diterapkan namun belum memuaskan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa upaya yang telah dilakukan setda dalam menginternalisasi perubahan budaya pada perangkat daerah belum cukup.

2. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Pada area penataan dan penguatan organisasi, penerapan organisasi berbasis kinerja dinilai belum maksimal. Hal ini ditandai oleh hasil evaluasi KemenPAN-RB Tahun 2021 dengan nilai perolehan 5,09 poin dari nilai maksimal 7,50 poin. Hasil ini disebabkan oleh penentuan struktur organisasi dinilai belum didasarkan pada arsitektur kinerja atau proses bisnis. Kondisi eksisting bahwa arsitektur kinerja telah dapat memperlihatkan adanya

ketidaktepatan fungsi pada suatu struktur unit kerja namun tindak lanjut dari penemuan tersebut belum diaplikasikan.

3. Area Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana berkaitan dengan mekanisme kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, penerapannya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dinilai belum maksimal ditandai dengan hasil evaluasi KemenPANRB Tahun 2021 yang memberikan nilai 4,34 dari nilai total 6,25 poin. Penilaian ini didorong oleh belum jelasnya relasi konseptual antara proses bisnis dan pengukuran kinerja. Lalu, keterhubungan antara proses bisnis dan prosedur standar operasional (SOP) juga belum dirumuskan.

4. Area Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dinilai 'memuaskan' yang diperlihatkan dari hasil evaluasi KemenPANRB Tahun 2021 dengan nilai 85,01 poin atau kategori A. Perolehan ini sudah baik namun belum sesuai dengan harapan. Beberapa hal yang masih memerlukan optimalisasi adalah tingkat akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain daripada itu, kualitas pelaporan kinerja yang belum informatif belum dapat memberikan dampak signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai target kinerja selanjutnya.

5. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan publik dinilai memiliki kualitas tertinggi dengan kategori A. Sehingga pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berada dalam zona hijau. Namun hasil evaluasi KemenPANRB memperlihatkan bahwa pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum ditingkatkan secara maksimal. Dari data penilaian Tahun 2021, diperoleh nilai 5,08 poin dari total maksimal sebesar 6,25 poin. Adapun beberapa aspek yang dinilai memerlukan peningkatan antara lain adalah pengelolaan pengaduan dan konsultasi serta inovasi pelayanan publik.

D. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

1. Terobosan/Inovasi (*Lesson Learnt* bagi Instansi)

a. Terobosan Inovasi Lokus

Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan Integritas dan memaksimalkan budaya organisasinya, yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan publik pada OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya Penguatan budaya kerja yang dikehendaki untuk pemberdayaan SDM pegawai dapat diperoleh melalui tahap perumusan nilai (*core value*), implementasi budaya kerja serta tahap monitoring dan evaluasi. Hasil studi lapangan memperlihatkan bahwa, aparatur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan nilai-nilai budaya kerja secara umum dalam kategori baik, namun perlu ada penguatan melalui formalisasi nilai-nilai budaya kerja sebagai nilai organisasi.

Berbagai keberhasilan inovasi yang diraih oleh Bagian Organisasi Setda Jawa Barat tentunya merupakan contoh penerapan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat yang terus menginspirasi dan mendorong untuk memunculkan minimal 1 (satu) inovasi pada setiap Perangkat Daerah, inovasi ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di tengah berbagai permasalahan yang dimiliki Provinsi Jawa Barat.

Pola kepemimpinan transformasional ini juga dilaksanakan di Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat. Berikut ini beberapa implementasi pola kepemimpinan transformasional yang diterapkan:

1) Mendorong kreativitas dan budaya inovasi:

Pemimpin transformasional selalu berupaya untuk mendorong kreativitas dan inovasi unit kerjanya. Untuk menjamin keberlangsungan kreativitas dan inovasi tersebut, maka Gubernur Jawa Barat membuat satu tekad bersama untuk membangun Jawa Barat Bersama dengan menumbuhkan budaya inovasi. Menindaklanjuti tekad bersama ini, Biro Organisasi Setda Jawa Barat juga melakukan upaya-upaya untuk mendorong inovasi seperti melakukan kompetisi inovasi Pelayanan public yang bertujuan

untuk membiasakan budjaya berinovasi di kalangan birokrasi setiap tahunnya. Kompetisi ini menjadi upaya menjaring inovasi ciptaan instansi pemerintah serta memberikan apresiasi bagi penyelenggara yang bekerja luar biasa dalam memberikan pelayanan publik.

2) Mengembangkan jaringan dan kolaborasi:

Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat terus mengembangkan jaringan dan kolaborasi Pentahelixnya, antara lain:

- a. Komunitas.
- b. Akademisi
- c. Media Massa
- d. Bisnis
- e. Masyarakat
- f. Pemerintah

3) Mengembangkan kapasitas inovasi:

Pengembangan kapasitas inovasi juga menjadi perhatian Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis, Bimbingan Teknis terkait inovasi di Biro Setda Provinsi Jawa Barat secara berkala.

Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mendukung pelaksanaan Pembangunan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terkenal dengan slogan ***“Innovation and Growth For A Fundamental Shift”***. Inovasi unggulan pada Biro Setda Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah:

- a) Aplikasi Surabi (Sistem Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Terintegrasi). Aplikasi ini merupakan system informasi untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi implementasi RB yang dilengkapi dengan petunjuk teknis.
- b) Portal Jabarprov. Portal ini menyediakan informasi resmi, akses ke berbagai layanan publik dan tempat menyampaikan aspirasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

- c) Jabarsuper.apps, aplikasi yang membuat pelayanan public menjadi lebih mudah dijangkau oleh semua kalangan.

b. Adopsi Bagi Instansi Peserta

Setelah melakukan analisis terhadap kunjungan terhadap lokus mitra studi lapangan, didapatkan beberapa poin yang dapat diadopsi dalam rancangan aksi perubahan. Berdasarkan Visitasi pada Locus di Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Jawa Barat dan dikaitkan dengan area perubahan penulis ditemukan inovasi bahwa pelaksanaan pelayanan di Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat sudah optimal dalam wadah/sistem terintegrasi berbasis digital untuk menampilkan potensi yang ada di masing-masing sub bagian-bagian. Selain itu, pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan lingkungan kerja yang dinamis dengan penempatan ruangan-ruangan yang tidak lagi kaku, sehingga para pegawai dapat lebih mengembangkan dirinya dengan lingkungan kerja yang nyaman dimana kedua hal tersebut dapat diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuasin, yakni terkait penerapatan sistem terintegrasi berbasis digital dengan menerapkan aplikasi penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi LRA Bulanan, serta menerapkan lingkungan kerja yang lebih fleksibel sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai khususnya pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Banyuasin.

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan Kegiatan adalah Rencana kerja secara rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang umumnya disusun dari Rencana Strategis.

Tahapan pembuatan Portal Jabr.Prov oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimulai sejak tahun 2020 dengan menyusun manual Jabar.Prov, hingga pada tahun 2023 dengan tahapan berikut:

- a. Service Desk Diskominfo, sejak 2018, Pembangunan Helpdesk Bimtek bagi perangkat daerah. Tahun ini telah berada di versi 2,5 yaitu integrasi layanan antar bidang dan perbaikan flow diagram.

2. Ekosistem Data Jabar, sejak 2019, Kumpulan komponen Manajemen Data di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang saling terhubung satu sama lain, terdiri dari: Core Data, Satu Data, Open Data, Satu Peta, Dashboard, dan Data Analytics.
3. Desa Digital, sejak 2019, program pengembangan desa melalui inovasi digital yang dilakukan melalui 4 tahapan pengembangan, yaitu pembangunan infrastruktur, pelatihan literasi digital, pelatihan pemasaran digital, dan implementasi pemanfaatan teknologi melalui Internet of Things (IoT).
4. Sistem Informasi Dokumen Elektronik Jawa Barat (SIDEBAR), sejak 2020, merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproduksi, distribusi, validasi dan pengarsipan tata naskah dinas elektronik di lingkungan internal Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat.
5. Portal Jabarprov, sejak 2022, portal layanan pemerintahan digital satu pintu yang terintegrasi serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat Jawa Barat dan Indonesia. Dilengkapi dengan Content Management System (CMS) yang efektif, efisien, dan mudah digunakan oleh OPD.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka penulis mulai merencanakan tahapan kegiatan Proyek perubahan dengan mengadopsi terobosan percepatan digital Kabupaten Banyuasin dengan mengoptimalkan system informasi informasi keuangan terutama terkait penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi serta penerapan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi pegawai.

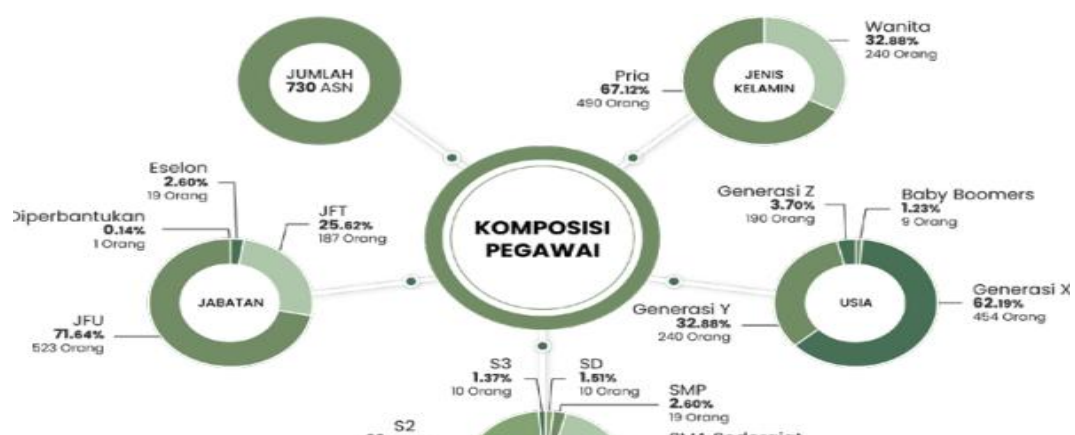
3. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatannya)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar dan teknologi canggih namun tidak ada SDM yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, pentingnya peran SDM dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi.

SDM (Sumber Daya Manusia) sangat penting untuk meningkatkan kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Penyederhanaan Birokrasi yakni melalui melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada Fase 1 yakni dari 345 Jabatan dan 343 pejabat yang disetarakan. Pada Fase 2 yakni 1.360 jumlah struktur yang disederhanakan dan 876 jumlah pejabat yang disetarakan. Sehingga total yakni 647 jabatan struktural sebesar 27,5 % dan 1.705 jabatan fungsional 72,4 %.
- Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja yang menerapkan pola team kerja yang bertanggung jawab langsung pada Pimpinan Level II memberikan ruang yang besar bagi pegawai yang menjadi ketua team kerja (berasal dari JF/Pelaksana) dalam memberikan inovasi dan Pengembangan kompetensi.
- Pendefinisian peran perangkat daerah dimana sinergitas keterkaitan fungsi organisasi berdasarkan proses kinerja sehingga dapat melaksanakan pencapaian sasaran strategis organisasi. Sinergitas Technostructure yakni merger antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Support Staff yakni Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai secara berkala. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, sehingga dapat dilakukan pelatihan atau pengembangan yang sesuai.
- Menyediakan pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Gambar 7
SUMBER DAYA MANUSIA



Berdasarkan data kepegawaian s.d. bulan Desember 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Setda Jabar) memiliki pegawai sebanyak 1.264 orang dengan komposisi 702 PNS, 28 CPNS dan 534 Non ASN. Dari sisi kualitas, potensi PNS pada Setda Jabar cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dengan mayoritas pegawai merupakan Sarjana (36,58%) dan bergolongan ruang III (62,47%). Apabila dilihat dari komposisi usia, mayoritas berada pada rentang usia 41-50 tahun (39,86%). Ketiga komposisi tersebut menggambarkan mayoritas PNS pada Setda Jabar memiliki pendidikan Sarjana atau memiliki pengalaman bekerja yang cukup lama. Keduanya, memiliki kontribusi positif terhadap ketercapaian kinerja unit organisasi.

Namun demikian, Setda Jabar memiliki komposisi PNS dengan pendidikan D-III sebanyak 48 pegawai (6,58%). Jumlah tersebut lebih rendah dari pegawai berpendidikan SLTA sederajat sebanyak 157 pegawai (21,51%). Selain itu, Setda Jabar memiliki Non ASN untuk mendukung kelancaran dan efektivitas kinerja PNS.

Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum memiliki jumlah Non PNS yang cukup besar bila dibandingkan dengan Biro yang lain. Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap inovasi/proyek perubahan yang sedang dilakukan oleh performer stakeholder yang akan terlibat dalam proyek perubahan ini terdiri dari stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Adapun identifikasi stakeholder yang terkait dengan proyek perubahan.

4. Manajemen Resiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu

organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP, salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.964- Inspt/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Provinsi Jawa Barat perlu ditetapkan struktur Manajemen Risiko. Struktur Manajemen Risiko terdiri dari:

- a. Komite Manajemen Risiko Provinsi Jawa Barat, yang melakukan pengendalian tingkat kebijakan Provinsi Jawa Barat;
- b. Kepala Perangkat Daerah, yang melakukan pengendalian tingkat operasional;
- c. Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (*Compliance Office for Risk Management*), yang melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko.

Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa barat membuat Komite Manajemen Resiko Provinsi Jawa Barat, komite ini terdiri dari, :

- a. Komite Eksekutif
 - 1) Gubernur selaku Ketua
 - 2) Wakil Gubernur selaku Wakil Ketua
 - 3) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Ketua Komite Pelaksana Selaku Anggota
- b. Komite Pelaksana
 - 1) Kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Ketua
 - 2) Kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Wakil Ketua

3) Para Kepala Perangkat Daerah yang terkait Selaku Anggota

- c. Biro/Bagian, pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang menangani urusan yang terkait dengan Administrasi Pembangunan selaku Sekretariat Komite Manajemen Risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 1950. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2020. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2021. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Renstra Setda Pemprov Jawa Barat tahun 2024-2026
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2022. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Waktu Kerja Dan Lokasi Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Republik Indonesia. 2023. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Pegawai
- Pemerintah Provinsi Jawa barat. 2021. Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2021 Tentang Manajemen Kinerja Yang Menerapkan Pola Tim Kerja Yang Bertanggung Jawab Langsung Pada Pimpinan Level II
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2016. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.964- Inspt/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2022. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 155 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

LAMPIRAN

PESERTA PKA TIBA DI GEDUNG SATE



PENERIMAAN PESERTA PKA DI RUANG PAPANDAYAN



AUDIENSI PESERTA PKA DI BIRO ORGANISASI



PENYERAHAN CINDERAMATA



DOKUMENTASI RAMAH TAMAH



PENYUSUNAN LAPORAN STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI





Laporan Studi Lapangan Kinerja Organisasi

**Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat**

DISUSUN OLEH :

1. KETUA : Dr. DIAN ARYOGO SUTOYO, M. Psi
2. WAKIL KETUA : SEPTA MARUS EKA PUTRA, S.H, M.H
3. SEKRETARIS : LYDIA GUSMALITA, S.STPM.Ec. Dev
4. ANGGOTA :
 1. ARYA DEWANTARAS.E, M.Si
 2. IMAM ILHAM, S.H, M.H
 3. ALEXANDER, S.IP.M.Si
 4. JUFRIANSYAH, S.STPM.Si
 5. DERRY ARIADI, S.H, M.H
 6. FETRI ASWANTI, S.TM.Si, M.
 7. ARDHILES P. RAJA SIAHAAN, S.T
 8. HENDRI WARDISON, S.PM.Si
 9. PUTRI DAMAYANTI, S.Psi, M.M
 10. SRI ULFATI, S.H
 11. BRAM ABRAHAM, SE
 12. NUR AINUN TANJUNG, S.Ag



Tugas dan Fungsi Biro Organisasi

Tugas

menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang organisasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja serta tatalaksana yang menjadi kewenangan Provinsi

Fungsi

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang organisasi;
- b. penyelenggaraan administrasi Biro Organisasi;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Organisasi; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Empat Sasaran Implementasi Kebijakan

01

Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Smart, Bersih, Dan Akuntabel

02

Meningkatnya Keimanan Dan Kerukunan Umat Beragama Dalam Kerangka Demokrasi '

03

Terbentuknya Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan

04

Terwujudnya Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Pihak Lainnya Dalam Pembangunan Yang Sinergis Dan Integratif '

No	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Provinsi Jawa Barat											
6	Nilai Manajemen Perubahan	Nilai	3.69	3.69	3.45	3.55	3.65	3.25	3.25	3.97	4.92*	
7	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	N/A	N/A	3.94	4.06	4.18	N/A	N/A	3.75	7.09*	

Key Success Factors

01

Komitmen tinggi
dari seluruh
Stakeholder

03

Pembangunan Jejaring,
Kerja dan Kolaborasi
Pemangku Kepentingan

02

Kepemimpinan
Transformasional
dan Inovatif

04

Pemanfaatan Teknologi
Digital



Lessons Learned Hasil STULA

01

Planning and budgeting

Melalui pelaksanaan
"Program Penataan
Organisasi"

02

Pemanfaatan Teknologi Informasi

- ✓ Sidebar Mobile Apps (tatakelola persuratan)
- ✓ TRK (Aplikasi E- Kinerja)
- ✓ KMOB (aplikasi Kehadiran Mobile)
- ✓ SURABI (Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi)
- ✓ Portal JABARPROV
- ✓ JAPATI (Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Terintegrasi)

Lessons Learned Hasil STULA (lanjutan)

03

Sistem Kerja Aparatur

- ✓ Tim Internal Bidang
- ✓ Tim Agile antar Bidang
- ✓ Tim Agile Lintas Perangkat Daerah
- ✓ Tim Agile Lintas Instansi

04

Manajemen Kinerja

- ✓ Manajemen Proses Bisnis
- ✓ Membangun Arsitektur Kinerja
- ✓ Menyusun Cascading kinerja
- ✓ Menyusun Crosscutting kinerja lintas

05

Manajemen Resiko

- Membuat komite manajemen resiko :
- ✓ Komite Eksekutif
 - ✓ Komite Pelaksana
 - ✓ Biro/bagian



Lesson Learned Hasil lanjutan

06

Peran Kepemimpinan

- ✓ Mendorong Kreativitas dan budaya inovasi
- ✓ Menciptakan lingkungan kerja yang dinamis
- ✓ Mekanisme kerja dinamis
- ✓ Mengembangkan jaringan dan kolaborasi

07

Inovasi Pelayanan

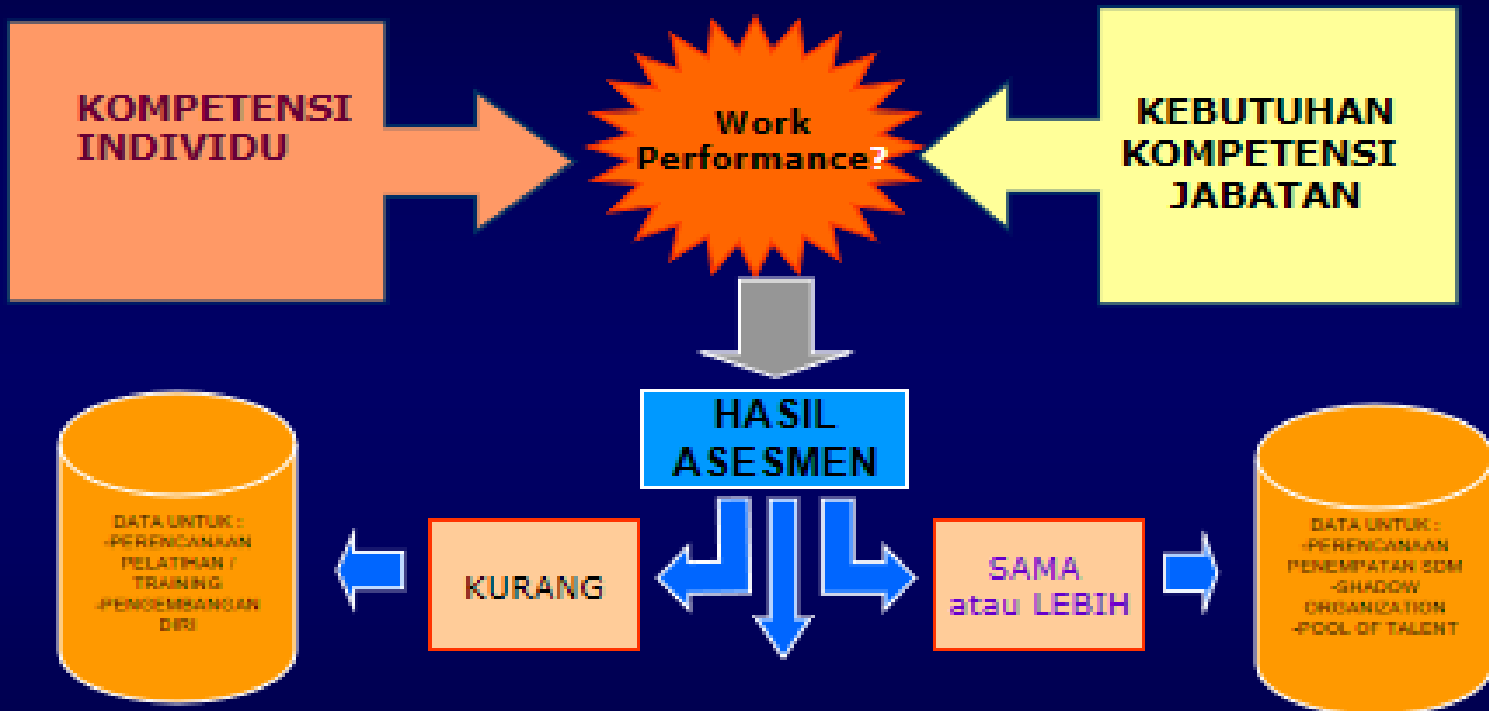
- ✓ Sidebar Mobile Apps
- ✓ Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK)
- ✓ KMOB (Aplikasi Kehadiran Mobile)
- ✓ Aplikasi Surabi (Sistem pengukuran Indeks Reformasi Birokasi Terintegrasi)
- ✓ Portal Jabar Prov
- ✓ JAPATI (Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Terintegrasi)

08

Kompetensi dan Pemberdayaan SDM

- ✓ Penyederhanaan Birokrasi
- ✓ Penyederhaan Struktur Organisasi dan tata kerja
- ✓ Pendefinisian Peran Perangkat Daerah
- ✓ Manajemen Talenta dengan melakukan inovasi SIM Jawara

IMPLEMENTASI ASESMEN POTENSI & KOMPETENSI SDM

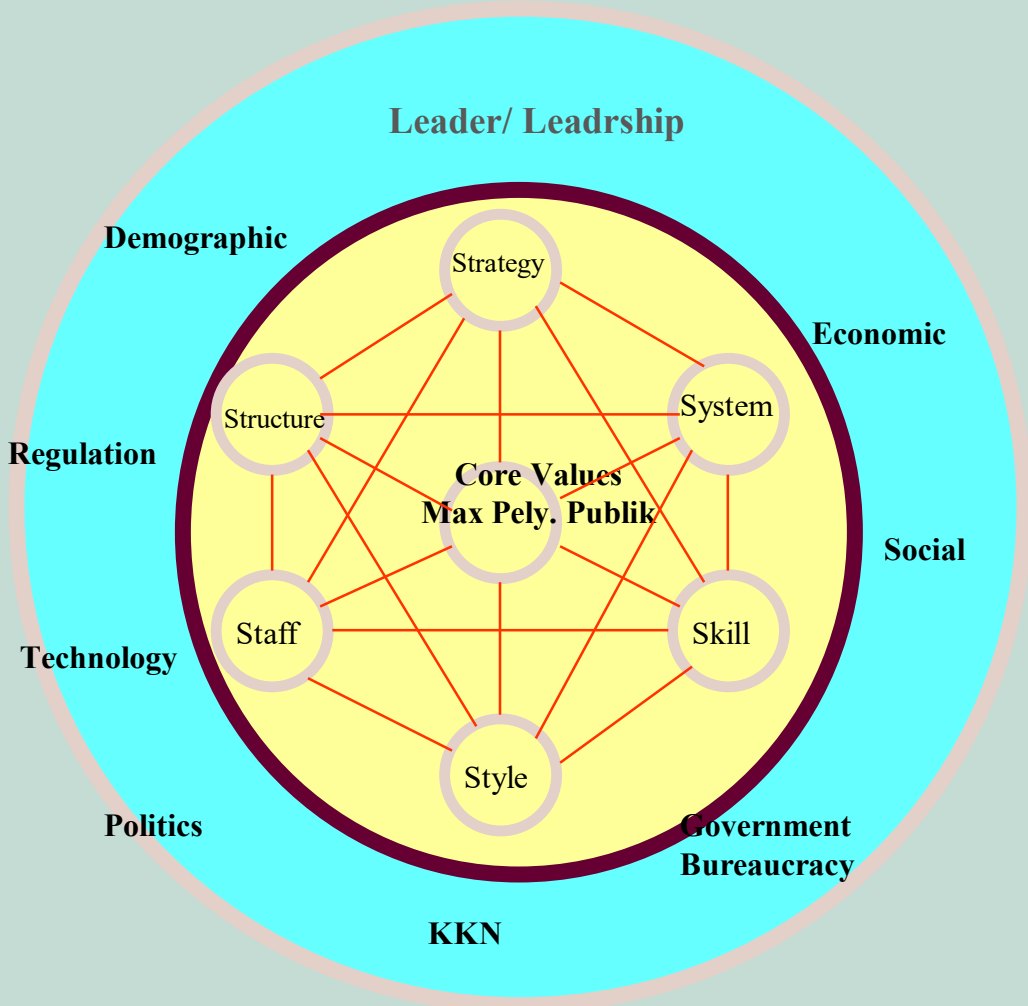


MODEL MANAJEMEN TALENTA



**DISRUPTION
ERA**

Volatile, Uncertain,
Complex, Ambiguous



FINAL LEASON LEARN COMPARATIF STUDY ORGANISASI (JAWA BARAT & SUMATERA SELATAN)

Personal

- ✓ Resiliensi
- ✓ Responsif dan terbuka terhadap perubahan
- ✓ Inovatif
- ✓ Selalu berusaha mengembangkan diri
- ✓ Memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi

Pengelola SDM

- ✓ Merekrut & mengidentifikasi potensi Talent
- ✓ Membangun keterampilan pegawai
- ✓ Menyusun program pengembangan pegawai
- ✓ Memberikan informasi karier yang jelas

Pimpinan

- ✓ Memperkuat komunikasi dengan pegawai, menjadi role model
- ✓ Memberi spirit
- ✓ Memberikan arahan yang jelas
- ✓ Memberi apresiasi kepada pegawai

Organisasi

- ✓ Menarik Talent terbaik
- ✓ Adanya pilihan kerja fleksibel
- ✓ Menyediakan lingkungan kerja yang adil, kompetitif, dan transparan

ORGANIZASIONAL BEHAVIOR



EVALUATION

INPUT:

Raw Input, Instrumental input

Output:

Lulusan, Capaian Tujuan Pembelajaran

Outcome:

1. Kemanfaatan bagi jabatan (talent pool/management)
2. Kemanfaatan bagi instansi (Kinerja Organisasi, IKU)

Benefit, Impact:

1. Bagi Masyarakat
2. Bagi Daerah: Capaian RB Tematik, IKD



Perubahan sistem organisasi dan tata kerja di Pemprov Jawa Barat berhasil dengan baik karena mendapatkan dukungan penuh peran kepemimpinan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

“

**DIGITALISASI
ADALAH TOOLS,
BUKAN TUJUAN.**

**KEPUASAAN PUBLIK
ADALAH TUJUAN
SEBENARNYA.**

”

